



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0134/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

**M. Natsir bin Amir**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat kediaman di RT.006 RW.004 Dusun Tambora Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sariani binti Magra**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.006 RW.004 Dusun Tambora Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 05 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0134/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 21 tahun;

Hal. 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Subhi (Paman / adik kandung dari ayah kandung Pemohon II), Karna ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dengan Mahar berupa Uang Rp. 2.000.000 dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi:

I. Zaenudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Kadindi, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu,

II. Kasman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006 RW. 004 Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima,

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Wahyuda Aria Manda (L) lahir tanggal 25-09-2009;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Nomor : 6013 0167 0833 9799 dan

*Hal. 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm*



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, Nomor : 141.013/76/05/IX/2019 tanggal 03, bulan 02 tahun 2019 sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Natsir bin Amir**) dengan Pemohon II (**Sariani binti Magra**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember tahun 2008 di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

### Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan hakim, para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206141207850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 27 Nopember 2012 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206144107871129 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 16 Maret 2018. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206141412110001 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Miskin : Kartu Keluarga Sejahtera tanggal 03 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Sukriadi umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 004 Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama M. Natsir bin Amir dan Pemohon II bernama Sariani binti Magra;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;

Hal. 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah (Paman dari Pemohon II) Karna ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Zaenudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Kadindi, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu,, dan Kasman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006 RW. 004 Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima,
- Bahwa, pada saat akad nikah ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Tambora Desa Oi Bura;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Muhdar bin Zaenal umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di RT. 006 RW. 004 Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Pemohon I bernama M. Natsir bin Amir dan Pemohon II bernama Sariani binti Magra;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah (Paman dari Pemohon II) Karna ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Zaenudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Kadindi, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu., dan Kasman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006 RW. 004 Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima,
- Bahwa, pada saat akad nikah ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Tambora Desa Oi Bura;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*"

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

*Hal. 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 beserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu/miskin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Oi Bura, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda, dengan wali nikah (Paman dari Pemohon II), saksi nikah Zaenudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001

*Hal. 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm*





SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Kadindi, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu,, dan Kasman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006 RW. 004 Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima,

2. , ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena ketidakmampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan

*Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm*



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

*Hal. 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Ketua Sekretaris Pengadilan Agama Bima selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W22-A5/041/Pd/Kw.01/SK/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (M. Natsir bin Amir) dengan Pemohon II (Sariani binti Magra) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'idah 1440 H, oleh **Drs. Syarifuddin, M.H.** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

Hal. 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Syarifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Nurhayati**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	294.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp. 350.000,-</b>	

*(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Agama Bima

**Arifuddin Yanto. S.Ag**

Hal. 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 134 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)